

## Abstrak

Penjatuhan sanksi administratif kepada penyelenggara pemerintahan daerah yang terlambat dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji terhadap sanksi administratif yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Jember berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif*. Hasil dan pembahasan penelitian adalah keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Jember disebabkan oleh adanya itikad tidak baik dari penyelenggara pemerintahan daerah untuk menyelesaikan APBD Tahun Anggaran 2020. Sehingga diperlukan kedua unsur penyelenggara pemerintahan daerah yaitu Bupati dan DPRD Daerah dapat bersinergi dan berkomunikasi dengan baik dalam kedudukan APBD, agar tidak terdapat lagi salah satu diantara penyelenggara pemerintahan daerah yang dijatuhkan sanksi administratif.

***Kata Kunci : Sanksi Administratif, Pemerintahan Daerah, APBD.***

## *Abstract*

*The imposition of administrative sanctions on regional government administrators who are late in determining the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) has been regulated in Article 312 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. This study aims to determine and examine the administrative sanctions given by the Governor of East Java to the Regent of Jember based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The research method used is normative juridical. The results and discussion of the research are the delay in determining the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in Jember Regency due to bad faith from local government administrators to complete the 2020 Fiscal Year APBD. communicate well in the APBD position, so that no one of the regional government administrators is subject to administrative sanctions.*

***Keywords: Administrative Sanctions, Regional Government, APBD.***